

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan potensi daerahnya. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa meningkatkan daya saing daerah diperlukan perencanaan yang matang.

Kabupaten Bantul merupakan cerminan sempurna perpaduan antara dunia modern dan budaya tradisional, tak heran jika banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri berkunjung ke Kabupaten Bantul.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pesisir Selatan DIY Kabupaten Bantul merupakan bagian dari kebijakan pengembangan destinasi pariwisata Yogyakarta. tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2025

Panjang jalan di kabupaten Bantul pada tahun 2019 mencapai 851,87 Km terdiri dari jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Untuk panjang jalan Kabupaten sendiri tercatat 624,47 Km. jenis perkerasan lentur (Aspal) sepanjang 810,18 Km (99,35 %). Jalan belum beraspal sepanjang 5,3 Km (0,65%). Bila dilihat menurut kondisi jalan bobot jalan dengan kondisi baik sebesar 51 % (423.715 Km), jalan kondisi sedang

0,24 % (199,38 Km) Jalan kondisi rusak 0,16 % (130.25Km). Jalan kondisi rusak berat tercatat 0,08 % (62,135 Km) (Bantul dalam angka, 2020)

Kondisi infrastruktur yang memadai menjadi modal utama bagi Kabupaten Bantul dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Pengembangan Prasarana jaringan jalan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi taraf hidup masyarakat, pengembangan wilayah dan berpotensi pendayagunaan sumber daya alam secara optimal.

Sebelum anggaran penanganan jalan disahkan dilakukan pembahasan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY (DPRD DIY), perwakilan masyarakat dan lembaga sosial serta jumlah usulan pemeliharaan jalan . program dan ketersediaan jumlah anggaran yang biasanya tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang tersedia, berimplikasi pada proses penetapan usulan yang tertuang dalam APBD membutuhkan pembahasan yang cukup panjang.

Penyusunan rencana kegiatan penanganan jalan meliputi penetapan rencana kinerja jalan dan rencana kebutuhan biaya konstruksi. Lingkup kegiatan penanganan jalan tersebut meliputi program preservasi jalan, dan program pembangunan jalan baru. Desentralisasi dan otonomi menjadi tantangan dalam penyelenggaraan jalan sehingga sinkronisasi program preservasi jalan, dan program pembangunan jalan baru sangat diperlukan antara pemerintah kabupaten , pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Berdasarkan hal tersebut diatas upaya optimalisasi dalam pendayagunaan anggaran preservasi dan pembangunan jalan perlu penerapan metode yang tepat untuk penanganan jalan secara bertahap. Metode yang akan digunakan adalah Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Para peneliti sebelumnya dalam penentuan prioritas penanganan jalan menggunakan metode AHP.

Potensi pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dikaji dalam kajian analisis pengembangan jaringan infrastruktur jalan ini. Penulis merasa terpanggil untuk mengkaji permasalahan tersebut sebagai bahan kajian dengan judul **"ANALISIS PRIORITAS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN Mendukung PARIWISATA PANTAI SELATAN DI KABUPATEN BANTUL"**.

1.2 Rumusan Masalah

Keterbatasan anggaran penanganan jalan dan banyaknya usulan penanganan jalan dipandang perlu meningkatkan strategi dalam penyusunan program dan prioritas penanganan jalan untuk lebih efektif sesuai kebutuhan kondisi di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Kriteria – kriteria apa saja yang menjadi prioritas dalam proses pengembangan jaringan jalan dalam mendukung pariwisata Pantai Selatan di Kabupaten Bantul
2. Belum adanya prioritas pengembangan jaringan jalan menuju Pantai Selatan di kabupaten Bantul

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki batasan masalah dan penelitian ini terbatas pada ruas jalan sebagai berikut :

1. Yogyakarta – Bakulan – Parangtritis
2. Yogyakarta – Bantul – Samas

1.4 Keaslian Penelitian

Pantai Selatan di Kabupaten Bantul, adalah kawasan pariwisata yang sedang berkembang hingga saat ini. Banyaknya obyek dan daya tarik wisata berpengaruh pada perekonomian dan kondisi lingkungan pada daerah tersebut. sehingga prioritas pengembangan jaringan jalan menuju kawasan tersebut sangat diperlukan. Berdasarkan data tesis yang bersumber dari internet, bahan kajian Judul ” **ANALISIS PRIORITAS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN Mendukung Pariwisata Pantai Selatan di Kabupaten Bantul**” ini belum pernah dilakukan sebelumnya.

studi yang pernah dilakukan yaitu :

1. Mukhlis Ramli, Sofyan M. Saleh, Renni Anggraini Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala Volume 1 Spesial Issue, Nomor 1, September 2017:1-14 dengan Judul Studi Pengembangan Jaringan Jalan Pendukung Rencana Induk Pelabuhan (RIP) di Provinsi Aceh tujuan penelitian tersebut

adalah untuk Mengetahui pemilihan kriteria dalam proses penentuan prioritas pengembangan jaringan jalan untuk mendukung Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Aceh, menetapkan pemilihan alternatif prioritas antara Penanganan dan pengembangan jaringan jalan.

2. Raymond Benardus Munthe, Bagus Hario Setiadji dan Suseno Darsono Jurnal Media Komunika Teknik Sipil Volume 21, No.1, Juli 2015:1-11 dengan judul *Menentukan Prioritas Penanganan Ruas Jalan Nasional di Pulau Bangka* tujuan penelitian tersebut untuk menentukan prioritas penanganan Jalan nasional di Pulau Bangka dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) menggunakan 6 (enam) kriteria yakni aksesibilitas, mobilitas, kondisi ruas jalan, arus lalu lintas pengembangan wilayah, dan ekonomi menurut produk domestik regional bruto.
3. Gerardus Ignasius A, Ludfi Djakfar, dan M.Ruslin Anwar Jurnal Rekayasa Sipil/Volume 8, No. 1-2014; 1-11 dengan judul *Studi Penentuan Prioritas Pengembangan Jaringan Jalan di Kabupaten Lembata – Provinsi NTT* tujuan dari penelitian tersebut menentukan kriteria yang sesuai dengan metode Cut Off Point serta menetapkan prioritas pengembangan jaringan jalan dengan metode *Analytick Hierarchy Process* (AHP).
4. Rizal Afriansyah, Achmad Wicaksono dan Ludfi Djakfar Jurnal Rekayasa SIPIL/Volume 6, No.3 – 2012: 1-12 dengan judul *Penentuan Prioritas Pengembangan Jaringan Jalan Pendukung Kawasan Strategis di Pulau Sumbawa*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi jaringan jalan.

5. Nur Ali, Muhammad Isran Ramli dan Muralia Hustim (2012), melakukan penelitian tentang *Studi Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten Di Kabupaten Pinrang – Sulawesi Selatan berbasis Metode Analisis Multi Kriteria* studi yang dilakukan menganalisis alternative pengembangan jaringan transportasi (sistem jaringan jalan) dengan menggunakan pendekatan Analisis Multi Kriteria (AMK).

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini untuk :

1. Menentukan kriteria yang menjadi prioritas dalam proses pengembangan jaringan jalan untuk mendukung pariwisata Pantai Selatan di Kabupaten Bantul.
2. Merumuskan arahan prioritas penanganan jaringan jalan menuju Pantai Selatan di Kabupaten Bantul.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Mengetahui strategi Pemda DIY dalam proses mewujudkan Pantai Selatan di Kabupaten Bantul sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menjadi sumber informasi bagi Pemerintah khususnya pemerintah pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda DIY dan

Pemkab Bantul dalam merumuskan strategi kebijakan penanganan jaringan jalan untuk mendukung proses mewujudkan Pantai Selatan di Kabupaten Bantul sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.

